



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	I
Jenis rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
Rapat ke	:	30
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 28 September 2016
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 6 Maret 2016;2. Roadmap Perluasan Kepesertaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia;3. Pembiayaan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;4. Pengaruh Klaim JHT sebelum 5 Tahun Terhadap Kinerja BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Rapat	:	Dra. Hj. Ermalena MHS/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, SH/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1 DPR/MPR-RI, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">A. 25 orang dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI; 6 orang anggota izinB. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka Ketua Rapat pada pukul 15.50 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan investasi Jaminan Sosial kepada instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan upaya perubahan *image* masyarakat terhadap Jaminan Sosial sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat guna meningkatkan kepesertaan secara optimal.
3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk membuat terobosan secara kongkrit dalam rangka peningkatan cakupan kepesertaan baik peserta BPU (Bukan Penerima Upah) termasuk pekerja rentan dan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI.
4. Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan MOU (*Memorandum of Understanding*) terkait dengan Jaminan Sosial di negara-negara tujuan penempatan TKI di luar negeri.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menjalin kerja sama dengan Komisi IX DPR RI.
6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dan laporan keuangan dan investasi terkini BPJS Ketenagakerjaan. Agar diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2016.

Rapat diakhiri pukul 18.30 WIB

**KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**



Dra. Hj. ERMALENA MHS
A-536